

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pada sektor pemerintahan. Transformasi digital mendorong negara-negara di dunia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang modern, cepat, dan transparan. Di Indonesia, agenda transformasi digital pemerintahan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia yang mampu menjawab tantangan era globalisasi serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, digitalisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik. Pemerintah Indonesia telah mengarahkan seluruh instansi untuk melakukan percepatan implementasi *e-government* melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bukan hanya sebatas penggunaan teknologi dalam administrasi, tetapi juga mencakup integrasi data, keterpaduan layanan, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis informasi. Dengan demikian, penerapan SPBE diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan SPBE adalah manajemen kearsipan. Arsip berperan vital dalam mendukung pengambilan keputusan, memberikan bukti akuntabilitas kinerja, serta menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan arsip secara digital menjadi kebutuhan mendesak dalam era birokrasi modern. Kearsipan yang tertata dengan baik memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik secara lebih optimal, sekaligus mendukung prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Dengan transformasi digital, pengelolaan arsip tidak lagi hanya sekadar menyimpan dokumen, tetapi juga memastikan aksesibilitas, keamanan, dan integritas informasi.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), yaitu aplikasi nasional yang dirancang untuk memperkuat pengelolaan arsip secara elektronik dan terintegrasi antarinstansi.

SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem kearsipan digital yang aman, efisien, dan

terstandar. Aplikasi tersebut diperkenalkan secara resmi pada 27 Oktober 2020 sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menegaskan pentingnya digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan di era modern.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 yang menetapkan SRIKANDI sebagai aplikasi umum nasional bidang kearsipan dinamis. Kebijakan ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menggunakan satu sistem kearsipan terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi administrasi, menghindari duplikasi aplikasi, serta menciptakan standar nasional dalam pengelolaan arsip elektronik.

Implementasi lebih lanjut diperkuat melalui Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yang memberikan panduan teknis bagi instansi pemerintah dalam mengoperasikan aplikasi SRIKANDI. Pedoman ini mencakup aspek penguatan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, dan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya membangun sistem kearsipan nasional yang seragam, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penerapan aplikasi SRIKANDI. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan

kearsipan digital di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat implementasi SPBE secara menyeluruh. Melalui regulasi ini, setiap perangkat daerah diarahkan untuk mengelola arsip secara elektronik dengan berpedoman pada prinsip kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas.

Selain sebagai landasan hukum, peraturan tersebut juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor kunci keberhasilan penerapan aplikasi SRIKANDI. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola kearsipan yang efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan digital yang bersih dan berdaya saing di era transformasi birokrasi modern.

Pelaksanaan kebijakan nasional tersebut mulai diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai langkah awal dalam mendukung transformasi digital bidang kearsipan, pemerintah daerah ini melaksanakan peluncuran sekaligus bimbingan teknis pertama aplikasi SRIKANDI pada 9–10 Desember 2021 yang bertempat di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta diikuti oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan instansi pemerintah daerah yang juga melaksanakan kebijakan implementasi Sistem Kearsipan

Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah satu dari sekian banyaknya bagian lainnya yang ada di pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang didedikasikan untuk pengelolaan arsip di instansi tersebut.

Berdasarkan Observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ternyata terdapat beberapa fenomena dalam implementasi aplikasi SRIKANDI ini, di antaranya:

1. Beberapa pegawai masih berada pada tahap penyesuaian dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Kondisi ini dipengaruhi oleh sebagian pegawai masih berstatus sebagai pegawai baru.
2. Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI, masih ditemukan keterbatasan dalam penyelenggaraan pelatihan yang berkesinambungan bagi pegawai baru. Kondisi ini membuat sebagian pegawai berupaya memahami prosedur penggunaan aplikasi secara mandiri ataupun melalui bantuan rekan kerja, sehingga penerapan standar penggunaan belum sepenuhnya seragam.
3. Terdapat pula kendala teknis berupa gangguan aplikasi, seperti jaringan internet yang kurang stabil serta kondisi *server down*. Faktor ini seringkali menghambat proses unggah dokumen, disposisi elektronik, hingga pencarian arsip yang dibutuhkan segera. Akibatnya, alur administrasi yang seharusnya lebih cepat dengan sistem digital justru menjadi terhambat.

4. Sebagian pegawai masih terbiasa menggunakan metode manual dalam pengelolaan sistem administrasi persuratan dan kearsipan, yang merupakan bagian dari pola kerja sebelumnya.

Penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, diharapkan mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam tata kelola arsip. Melalui sistem ini, dokumen dan arsip dinamis dapat dikelola secara elektronik, sehingga memudahkan akses, mempercepat alur disposisi surat, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit kerja. Lebih jauh, keberadaan aplikasi SRIKANDI juga mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan data yang lebih akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari fenomena latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan hanya pada Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Teori yang mendukung George C. Edward III (Dalam Leo Agustino, 2022:154) yaitu:

1. Komunikasi

2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah literatur terkait Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Pemerintahan Daerah.

- b. Menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan penerapan sistem kearsipan digital.
- c. Mendukung pengembangan konsep teori implementasi kebijakan publik, khususnya teori George C. Edwards III, dalam konteks transformasi digital birokrasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital di lingkungan pemerintahan. Secara lebih rinci:

- a. Menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyempurnakan alur implementasi SRIKANDI.
- b. Menjadi pedoman untuk merancang strategi pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM agar pemanfaatan aplikasi lebih optimal dan standar operasional dapat diterapkan secara konsisten.
- c. Membantu manajemen dalam mengidentifikasi serta mengatasi kendala teknis maupun budaya kerja yang menghambat digitalisasi arsip.
- d. Memberikan referensi bagi instansi pemerintah lain yang akan mengadopsi SRIKANDI atau sistem kearsipan digital sejenis, sehingga mempermudah proses adaptasi dan standarisasi.